



YOGYA MENUJU TAHAP PARIPURNA

Pj Walikota: KLA Bukan Akhir Capaian

YOGYA (KR) - Usai memperoleh predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama pada tahun 2021 lalu, Kota Yogya kini menuju tahap paripurna atau KLA yang sesungguhnya. Kendati demikian hal tersebut dinilai bukan akhir dari capaian melainkan awal untuk keberlanjutan program.

Hal itu diungkapkan Penjabat (Pj) Walikota Yogya Sumadi SH MH di sela verifikasi lapangan evaluasi KLA 2022, Selasa (5/7). Verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) digelar secara hybrid. "Kota Layak Anak bukan akhir capaian, tetapi awal untuk komitmen kita semua dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak secara berkelanjutan," ungkapnya.

Sumadi memaparkan, pencapaian KLA sudah dimulai sejak tahun 2017 dengan meraih tingkat Madya. Kemudian pada tahun 2018 hingga 2020 naik ke peringkat Nindya. Sedangkan tahun lalu naik lagi ke peringkat Utama, dan tahun ini tengah dilakukan verifikasi untuk menuju Paripurna atau KLA secara penuh.

Sejak awal pihaknya menjalankan program KLA bukan semata untuk mengejar predikat melainkan pemenuhan hak serta memberikan perlindungan melalui berbagai kegiatan di tiap OPD. Lima klaster terkait hal tersebut juga diupayakan secara maksimal. Masing-masing ialah klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. "Kami berharap tahun ini bisa mencapai KLA. Tapi sekali lagi, itu bukan akhir capaian melainkan awal komitmen dalam keberlanjutan program. Bahkan saya sudah meminta Inspektorat agar secara terus menerus mereview program di tiap OPD agar kegiatan berkaitan KLA terus ada," paparnya sembari mengaku jika anak adalah aset bagi keberlangsungan bangsa ke depan sehingga perlu disiapkan sejak dini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogya Agus Tri Haryono, mengaku keberlangsungan program KLA bukan

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melainkan semua stakeholder. Pemkot Yogya pun telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti dunia usaha, media massa hingga elemen masyarakat. Keterlibatan banyak pihak tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kegiatan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

Sementara itu, Koordinator Tim Evaluasi KLA Kementerian PPPA Prihantini Wijayanti, mengapresiasi kerja keras unsur Pemkot Yogya dalam menjaga keberlangsungan program. Menurutnya, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak itu pun sudah diatur dalam undang-undang. Bahkan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mendukung kebijakan nasional dalam pembangunan KLA. "Saat ini telah ada Peraturan Presiden (Perpres) 25 tahun 2021, sehingga pemda bisa lebih leluasa dalam menggulirkan program berkaitan KLA hingga penyediaan anggarannya," tandasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005